

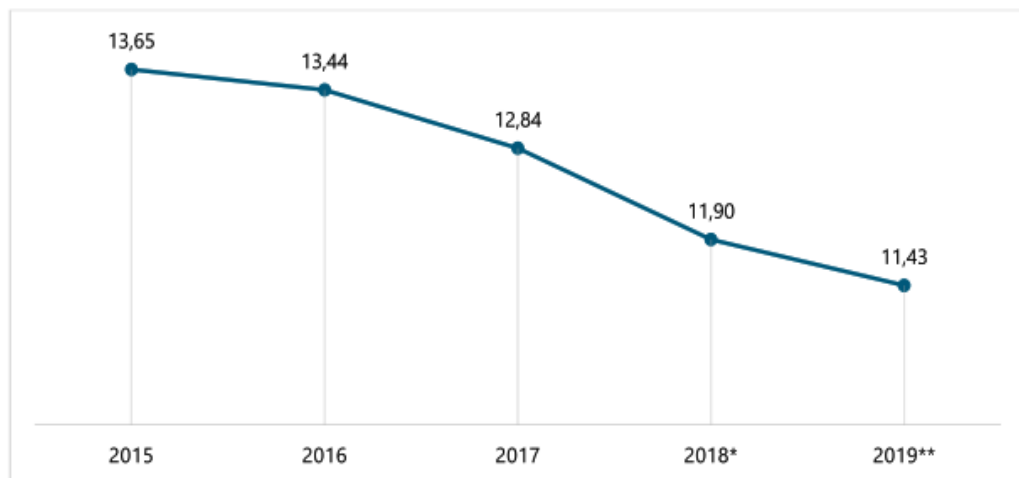
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian menjadi *leading sector* pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan keunikan tersendiri dalam kerangka perekonomian nasional. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan komoditas pertanian yang besar serta memiliki peran besar dalam memasok produk pertanian bagi kebutuhan nasional. Sektor pertanian dibagi menjadi 7 sub sektor yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, perikanan, kehutanan dan penebangan kayu. Salah satu sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur yang memiliki keunggulan yaitu sektor pertanian tanaman pangan (BPS Jatim, 2013). Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional berdampak besar pada seluruh warga negara. Ketahanan pangan merupakan salah satu hal yang mendukung dalam mempertahankan pertahanan keamanan, bukan hanya sebagai komoditas yang memiliki fungsi ekonomi, akan tetapi merupakan komoditas yang memiliki fungsi sosial dan politik, baik nasional maupun global. Pembangunan pertanian menginginkan termanfaatkannya semua potensi yang ada di masyarakat, baik potensi manusia, sumberdaya alam, teknologi, dan juga sumberdaya institusi secara optimal, menguntungkan dengan selalu menjaga kelestarian yang ada dilindungi (Kementerian Pertanian, 2010).

Pada tahun 2019, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Timur menduduki peringkat ketiga setelah kategori industri pengolahan (30,24%) dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (18,46%), yaitu sebesar 11,43 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan sektor pertanian terus menerus mengalami penurunan hingga 2,22%. Besarnya peranan sektor pertanian di tahun 2015 yaitu 13,65%,

kemudian di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 13,44%, kemudian menurun lagi di tahun 2017 menjadi 12,84%, lalu di tahun 2018 menjadi 12,90%, hingga di tahun 2019 menjadi 11,43% (BPS Jatim, 2019). Penurunan kontribusi sektor pertanian membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat pentingnya sektor tersebut terhadap keberlangsungan hidup masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1.1 Kontribusi Kategori Sektor Pertanian terhadap PDRB-ADHB Jawa Timur (persen) Tahun 2015-2019
Sumber : BPS (2019)

Fenomena ini muncul ketika upaya mendorong peningkatan produktivitas pertanian berbanding lurus dengan terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan permodalan. Keterbatasan modal juga membuat kuantitas dan kualitas hasil yang didapat petani tidak maksimal. Sifat budidaya lebih tergantung dengan alam, kegagalan panen yang dialami petani tentu menjadi permasalahan serius. Petani sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan, apalagi memiliki tabungan untuk menutupi kerugian usahatannya dan bagaimana petani mendapatkan modal untuk memulai kembali usahatannya, mulai dari pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan sarana produksi pertanian lainnya, dan karenanya petani akan dituntut untuk mendapat modal dari pihak lain. Akses terhadap kredit

dianggap sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Yuwono (2017) mengatakan bahwa akses kredit dapat meningkatkan efisiensi teknis dan efisiensi alokatif di sektor pertanian. Hal ini mempengaruhi tingkat efisiensi teknis petani sehingga mampu menerapkan metode produksi padat modal lebih banyak atau membeli lebih banyak input mesin dan pasar. Selain itu, kredit juga dapat meningkatkan efisiensi alokatif dengan membiarkan petani mengganti input nonpasar dengan input pasar dan meningkatkan kemampuan petani untuk menanggung risiko.

Modal bukan hanya sebagai salah satu faktor produksi saja, tetapi juga sebagai pendorong kapasitas petani untuk mengadopsi teknologi (Anik et al., 2017). Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program-program dalam upaya penanggulangan yang terbagi menjadi 3 klaster. Klaster I untuk mengurangi beban dan memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui akses pelayanan dasar, Klaster II untuk pemberdayaan masyarakat, dan Klaster III untuk penyaluran bantuan pembiayaan seperti kredit dan koperasi (TNP2K, 2012). Di sektor pertanian sendiri, pemerintah mengadakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang termasuk pada program Klaster II.

Program PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang pengelolaannya didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Program ini dimulai sejak tahun 2008 yang penyalurannya melalui Gapoktan sebagai pelaksana program PUAP. Hal ini dilakukan dengan tujuan Gapoktan dapat menjadi lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Pemberian dana PUAP diutamakan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis (Kementerian Pertanian, 2010). PUAP dirancang secara partisipatif dengan petani, kelompok

tani, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai pelaku utama yang difasilitasi oleh pemerintah dari tingkat Kementerian Pertanian sampai ke desa atau kelurahan (Dirjen Sarpras Pertanian, 2013).

PUAP dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha petani melalui koordinasi Gapoktan kemudian dikelola dalam salah satu sub kegiatan Gapoktan yang pada akhirnya dapat ditumbuhkembangkan menjadi sebuah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Keberadaan LKM-A menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan sektor pertanian di perdesaan karena mempunyai peran strategis sebagai penghubung dalam aktifitas perekonomian masyarakat tani. LKM-A juga berperan menguatkan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis yang tidak lepas dari lemahnya akses petani terhadap berbagai sumber daya produktif, yaitu: modal, teknologi, dan informasi pasar (Hanafie, 2010).

Tujuan umum pembentukan dan pengembangan LKM-A yakni untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usahatani bagi petani. Secara khusus pembentukan LKM-A bertujuan untuk :

1. Memudahkan akses petani terhadap skim pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya
2. Meningkatkan produktivitas dan produksi usahatani dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usahatani
3. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan, utamanya Gapoktan

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu penerima dana PUAP di wilayah Jawa Timur mulai tahun 2008. Jumlah Gapoktan penerima program PUAP dari tahun 2008 sampai dengan 2015 sebanyak 228 Gapoktan yang tersebar di 18 Kecamatan, dimana masing-masing Gapoktan menerima pinjaman sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Total keseluruhan dana

PUAP yang diberikan untuk Kabupaten Mojokerto dari tahun 2008-2015 sebesar Rp 22.800.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah). Adapun data Gapoktan penerima program PUAP tampak pada Tabel 1.

Tabel 1.1 Penyebaran penerima bantuan dana BLM-PUAP di Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Jumlah Gapoktan/Desa Penerima PUAP								Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jatirejo	4	2	1	3	0	0	0	4	14
2	Gondang	2	4	1	1	0	1	3	2	14
3	Pacet	4	2	0	3	5	3	1	1	19
4	Trawas	5	1	1	1	0	2	0	1	11
5	Ngoro	0	0	0	2	0	3	0	1	6
6	Pungging	0	0	0	5	0	2	1	2	10
7	Kutorejo	0	2	0	6	0	1	0	4	13
8	Mojosari	2	2	0	4	0	0	0	1	9
9	Bangsalsari	4	1	1	3	1	0	0	3	13
10	Mojoanyar	0	0	2	4	0	0	0	1	7
11	Dlanggu	3	3	0	5	0	1	1	0	13
12	Puri	4	2	0	6	1	0	0	2	15
13	Trowulan	3	0	0	4	0	1	0	5	13
14	Sooko	7	0	0	4	3	0	0	1	15
15	Gedeg	7	0	0	1	0	1	0	2	11
16	Kemlagi	5	3	1	3	0	0	0	2	14
17	Jetis	6	0	1	5	0	0	0	1	13
18	Dawarblandong	3	6	0	4	5	0	0	0	18
JUMLAH		59	28	8	64	15	15	6	33	228

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016

Program PUAP yang telah berjalan sejak tahun 2008 di Kabupaten Mojokerto perlu diketahui apakah dana PUAP telah dimanfaatkan untuk pengembangan usaha agribisnis yang mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan terbentuknya Lembaga

Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), maka diperlukan evaluasi terhadap manajemen pelaksanaan kegiatan PUAP. Evaluasi program PUAP dan pelaksanaan kegiatan PUAP sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana mengarahkan kegiatan PUAP agar tepat sasaran dan efektif. Kinerja program PUAP yang mencakup kinerja input, proses, output dan outcome akan digunakan sebagai pengetahuan yang akan mendukung evaluasi program secara keseluruhan (Sahat et al., 2011). Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kabupaten Mojokerto*".

1.2 Rumusan Masalah

Ketersediaan modal bagi pelaku usaha agribisnis merupakan sebuah keharusan karena merupakan salah satu faktor produksi dan faktor pendorong petani dalam mengadopsi teknologi. Menurut Syukur (2009), hampir 90% petani mandiri menggunakan modal sendiri untuk membiayai usaha pertaniannya. Ketika musim tanam tiba, petani akan mengusahakan modal dari berbagai cara agar dapat menanam, termasuk menggunakan aset pribadi. Kondisi tersebut disebabkan mayoritas usaha pertanian merupakan petani gurem dan kecil sehingga dihadapkan dengan keterbatasan akses layanan usaha, terutama permodalan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme kerja program PUAP pada gapoktan penerima dana PUAP ?
2. Bagaimana dampak kegiatan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap pendapatan petani?
3. Strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian terdiri dari :

1. Mengetahui mekanisme kerja dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
2. Menganalisis dampak program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap pendapatan petani.
3. Menganalisis dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan para pembuat kebijakan dalam rangka mengarahkan kebijakan peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan petani dan keluarga tani melalui pemberdayaan kelembagaan kelompok tani.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya anggota Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk memperoleh pengetahuan dan mampu merancang serta memperbaiki usahanya supaya mendapatkan manfaat sebesar-besarnya berkaitan dengan adanya Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
3. Sebagai bahan informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya.